

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Upaya meningkatkan peran dan kapasitas perempuan serta partisipasinya dalam pembangunan nasional sudah dimulai sejak era reformasi, pada tahun 2000 instruksi presiden mendorong Menteri pemberdayaan perempuan memberikan bantuan teknis kepada instansi dan Lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah. Pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada minimnya kesempatan kerja bagi kaum perempuan dari berbagai sektor seperti sector pemerintahan, swasta maupun informal. Data Bappenas pada tahun 2010 menunjukkan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) perempuan sekitar 50% sementara TPAK laki-laki pada periode yang sama rata-rata 84%. Adapun faktor dari terjadinya bias gender ini dikarenakan masih berkembangnya asumsi publik bahwa posisi perempuan sangat terbatas dalam lingkup domestik dan juga aspek sekunder dalam dunia pekerjaan (Zainal, 2013). Pola pikir yang masih berkembang dalam aspek politik dan juga pengambilan keputusan, mengakibatkan peran perempuan dalam ranah publik menjadi jarang diakui dan kedudukan perempuan masih terasingkan dalam ajang politik formal juga pengambilan keputusan (Rahman dkk,2005).

Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, yudikatif dan Lembaga Negara strategis lainnya, mengakibatkan kurangnya masukan-masukan dan kepentingan perempuan pada pembangunan bangsa melalui banyak aspek (Astrik, 2009:28). Untuk itu reposisi peran dan juga fungsi perempuan di era sekarang ini sangatlah efektif untuk mewujudkannya kesetaraan gender dalam kehidupan di berbagai aspek khususnya bernegara (Prantiasih A, 2016). Agar dapat mengoptimalisasi peran secara seimbang di sektor domestik dan publik, kaum perempuan membutuhkan diadakannya dukungan sistem sosial (social support system) yang dapat mendukung perempuan dalam memenuhi tuntutan formal objektif lingkungan kerja dan menunjukkan prestasi. (Prantiasih A, 2016). Oleh karena itu perempuan harus berkecimpung di dalam Gerakan-gerakan politis agar mampu mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan. Agar dapat

menyampaikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan, perempuan membutuhkan sebuah wadah untuk mampu membantu perempuan menyampaikan ide-ide yang relatif tidak berjalan lancar apabila dilakukan secara per-individu (Winardi J, 2016). Organisasi dapat dipahami sebagai sebuah Gerakan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terstruktur oleh dua individu bahkan lebih dengan yang memiliki peran relative untuk mencapai sebuah visi melalui kesepakatan Bersama (Robbins 2001:4).

Organisasi masyarakat merupakan wadah untuk perannya untuk menampung dan juga menjadi perpanjangan lidah dari hak dan aspirasi masyarakat dengan sebuah visi yang telah disepakati Bersama oleh setiap organisasinya (Nurdin dkk, 2016) secara keseluruhan organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu organisasi yang berorientasikan ekonomi atau dapat disebut organisasi profit dan juga organisasi yang tidak berorientasikan ekonomi atau non-profit, adapun organisasi yang dibentuk berdasarkan profit, didirikan dalam dasar membantu orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terkhusus pada pemilik organisasi tersebut dengan begitu keberhasilan organisasi ini dapat diukur melalui penghasilan yang dapat diraih oleh organisasi tersebut biasanya organisasi ini Bernamakan perusahaan, berbeda halnya dengan organisasi non-profit dimana keberhasilan maupun hal yang dapat diraih tidak berlandaskan ekonomi melainkan asal usul mengapa organisasi ini dibentuk dan juga orientasi bukan terhadap pemilik dan pembentuk organisasi melainkan kesejahteraan para konstituennya (A Sobirin, 2014). Menurut (Wursanto, 2003) terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat dari organisasi yaitu aspek pimpinan, aspek keresmian, aspek tujuan, aspek kewilayahan, dan aspek kebutuhan sosial, Dalam menjalankan perannya terdapat empat fungsi organisasi yang harus diperhatikan yaitu: Pertama *Planning* (Perencanaan) dalam menjalankan fungsinya organisasi harus memiliki rencana yang dilakukan oleh struktur organisasi berupa kegiatan maupun teknis pelaksanaan, kedua *organizing* (pengaturan) dimana pada aspek ini organisasi harus membentuk sebuah structural untuk memastikan alur komunikasi mampu terlaksana dengan baik antar bagian/seksi, Ketiga *Accounting* (pelaporan) aspek ini merupakan sebuah aspek terpenting karena setiap unsur organisasi harus melaporkan tanggung jawab yang telah dilakukan pada masa kepengurusan (Susanti dkk 2022:113-114).

Menurut Widaningsih (2022) organisasi kemahasiswaan adalah sebuah wadah yang memiliki struktur kepengurusan dan keanggotan mahasiswa itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan nalar, keilmuan, minat dan bakat yang telah dimiliki maupun belum dimiliki oleh mahasiswa, tridharma perguruan tinggi merupakan misi yang diberlakukan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, oleh karena itu mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan ketiga dharma perguruan tinggi tersebut yaitu: Pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat, Mahasiswa selaku agen perubahan tentunya memiliki tanggung jawab besar dalam lingkungan kebermasyarakatan, yang bagaimana mahasiswa melakukan inovasi maupun perubahan yang lebih baik di lingkungan masyarakat, organisasi ekstra kampus memiliki keutamaan dan kebermanfaatannya bagi mahasiswa itu sendiri yaitu memiliki cakupan jaringan yang semakin luas dari skala kampus menjadi skala nasional, sehingga setiap kader yang tergabung terhadap organisasi tersebut memiliki visi dan misi yang sama sehingga mampu terkoordinasi semakin baik namun kader tersebut pun memiliki tanggung jawab dan tugas semakin besar terhadap organisasinya, sehingga kader mampu mengikat antara satu dengan yang lainnya meskipun berbeda perguruan tinggi, dalam melakukan pengabdian terhadap masyarakat kohati memiliki berbagai cara dalam hal tersebut salah satu hal yang dilakukan kohati dalam melakukan pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan edukasi berupa literasi politik perempuan, dalam AD/RT Kohati yang sama dengan AD/RT HMI terdapat beberapa komitmen asasi yang disebut komitmen asasi dan asas Kohati yang disalah satu pointnya berisi tentang mengedukasi tentang isu keperempuanan, hal ini membuktikan bahwasanya Kohati berupaya dan fokus terhadap isu keperempuanan dan menjalankan fungsi dari tridharma perguruan tinggi tersebut, agar dapat menjalankan peranan dengan baik Kohati membekali HMI-Wati dengan peningkatan kualitas dan peranannya sehingga memiliki karakter diri yang teguh serta memiliki kemampuan intelektual dan skill profesional yang mandiri.

Menurut Friedman dalam (Masduki dkk, 2021) peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan kedudukannya di lingkungan sosialnya yang disematkan baik secara formal ataupun secara informal, peran ini sendiripun didasari oleh ketentuan maupun harapan yang ingin

didapati melalui individu-individu tertentu, tentunya hal ini melihat terhadap ruang dan waktu yang ada agar mampu memenuhi harapan dari mereka sendiri, adapun peran selalu bersangkutan terhadap tiga hal yaitu: peranan dilandasi oleh norma-norma yang dikaitkan dengan posisi maupun kedudukan individu itu sendiri di masyarakat kemudian peranan juga merupakan sebuah konsep tentang apa yang akan dilakukan individu dalam lingkungan masyarakat sebagai sebuah organisasi dan juga peranan merupakan perilaku seseorang yang penting bagi tatanan sosial ataupun kehidupan bermasyarakat agar terbangunnya sebuah keharmonisan.

Menurut Putri (2021) dalam portal berita Kompas.com “Peran perempuan dalam pergerakan mahasiswa yang ada di Indonesia dapat berupa Langkah konkret, seperti mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan intelektualitas, serta kemampuan kepemimpinan para aktivis yang ikut serta di dalamnya” tokoh R.A Kartini patut diacungi jempol atas perannya yang menjadikan semangat baru bagi para perempuan dengan Tindakan berani yang ditunjukkan saat melawan ketertindasan, ketidakberpihakan pada perempuan yang saat itu telah menjadi budaya patriarki di Indonesia, oleh karena itu perempuan harus terus mencari pemikiran dan terobosan baru untuk mendorong perempuan lebih berani dan hadir di ranah publik mulai dari tingkat terendah sampai dengan nasional (Indriyani dkk, 2020). Seluruh organisasi telah merancang landasan-landasan dan juga kebijakan yang dilakukan untuk membuat perempuan menjadi berdaya (Tarigan A, 2021).

Menurut Indah (2013) berhubungan dengan berjalannya waktu peran perempuan semakin dibutuhkan oleh masyarakat mulai dari aspek Pendidikan, sosial, hukum bahkan politik hal ini didasari oleh suatu kesepakatan umum bangsa-bangsa yang mengatasnamakan masyarakat global dimana sebuah kemajuan negara terlihat dari bagaimana regulasi memberikan sebuah jalan yang luas bagi perempuan untuk dapat memberikan perannya di ranah publik. Upaya nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dalam memberikan layanan bantuan hukum sangatlah penting eksistensinya, dikarenakan masifnya masyarakat yang kurang mampu dalam hal kebijakan hukum yang ada di Indonesia sehingga terkendala dalam mendapatkan akses keadilan, ditambah lagi oleh kepadatan penduduk yang tersebar merata di Indonesia tidak sebanding dengan advokat yang tersedia,

hal ini juga menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat, mahasiswa melalui organisasi yang dimilikinya telah menjalankan program-program kerja advokasi untuk mampu mendorong masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan kesadaran akan hukum sehingga proses demokrasi ditingkat lokal maupun nasional berjalan dengan baik (Rina MS dkk, 2020).

KOHATI merupakan organisasi mahasiswa Perempuan yang dibentuk untuk membina dan mendidik karakter perempuan yang muslimah sejati sehingga dapat menegakan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, dengan begitu dapat menjalankan fungsinya yang senantiasa wajib meningkatkan dan mengembangkan potensi dari dirinya masing-masing, sehingga Perempuan-perempuan ini nantinya akan mampu memahami wacana maupun dinamika keperempuanan sehingga mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan sosial yang ada (Tarigan A, 2021) Untuk membangun kesadaran bagi perempuan dalam hak dan wawasannya dibidang politik, KOHATI (Korps-HMIWATI) menjadi organisasi ekstra mahasiswa yang siap untuk menjadikan kaum perempuan sebagai kaum intelektual yang akan menjadi agen perubahan bagi negeri, masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi isu dan masalah yang semakin kompleks, membuat KOHATI semakin semangat dalam mejadi media pembelajaran bagi mahasiswa perempuan yang di harapkan dapat menjadi pelaku politik yang dapat menciptakan system politik yang baik (Widaningsih H, 2022). Menurut Ferliana (2011) dalam portal berita Kompasiana.com, KOHATI kerap kali mengambil peran dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan politik sehingga masyarakat tahu dan mampu mengawal transparansi anggaran yang di berikan oleh pemerintah yang diharapkan anggaran tersebut dapat digunakan dengan efektif dan responsive terhadap gender yang kemudian dapat memberikan rasa adil dalam masyarakat. Menurut Sasmita (2015) dalam portal berita Bawaslu.co.id kepengurusan KOHATI Jawa Barat mendorong dan mengagas adanya pemilih perempuan terlibat dalam pengawasan pilkada dalam hal ini membuktikan bahwasanya KOHATI sebagai Lembaga semi otonom membuktikan bahwasanya ikut berperan aktif dalam masyarakat. Mengutip melalui laman kohatibadkohmijatengdiy.com KOHATI merupakan sebuah badan khusus yang terdapat didalam himpunan mahasiswa islam untuk mencapai visi

yang telah menjadi pedoman himpunan mahasiswa islam ini sendiri, adapun tujuan dari dibentuknya kohati ini sendiri sebagai penyeimbang dalam organisasi-organisasi keperempuanan sehingga mampu memberikan keterwakilannya himpunan mahasiswa islam dalam mengawal isu-isu terkait keperempuanan secara umum. Melalui laman kowani.or.id/kohati/ kohati juga berperan untuk membentuk dan juga pembina Muslimah sejati agar mampu menegakkan dan menembangkan nilai-nilai ke-islaman dan keindonesiaan, adapun kegiatan eksternal yang dilakukan oleh kohati, merupakan perpanjangan tangan HMI disegala tingkatan nasional.

Dalam buku *Pendidikan, sosial dan budaya: sebuah tinjauan di kabupaten lamongan* Dengan adanya organisasi yang mengawal terhadap isu-isu terkait keperempuanan, diharapkan mampu menjadi kontrol bagi setiap kebijakan publik yang akan dan bahkan telah ditetapkan oleh pihak regulasi, kasus mengenai ketidakadilan gender masih kerap ditemui ditengah-tengah masyarakat, perempuan masih juga menjadi pihak yang kurang diuntungkan karena masih terjadinya ketimpangan hubungan gender, oleh karena itu pemerintah melalui inpres no. 9/2000 tentang pengarusutamaan gender menjadi strategi yang dirancang untuk menciptakan keadilan gender sehingga menjadi satu dimensi integral mulai dari pembentukan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan bahkan evaluasi untuk kebijakan dan program pembangunan diseluruh element baik Lembaga pemerintah, non-pemerintah dll, baik ditingkat nasional sampai dengan tingkat daerah, strategi tersebut dapat dilaksanakan, apabila melalui proses penganalisaan perspektif gender kedalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan dan juga kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pengalokasian sumber daya pembangunan. (Vungky dan sholihah, 2021). Strategi PUG ini pun dilaksanakan dengan bertujukan sebagai Langkah mewujudkan kesetaraan gender baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kehidupan sosial, Oleh karenanya Kebijakan Publik yang pro-perempuan dapat diartikan sebagai perencanaan kebijakan yang didasari oleh aspirasi maupun kebutuhan dalam perspektif perempuan dalam pembangunan sedangkan perencanaan program adalah operasionalisasi dari kewenangan pemerintah disegala tingkatan wilayah (Nurkholis dan Khusaini, 2019).

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, Dalam hal ini penulis menetapkan Batasan wilayah dalam penelitian ini yaitu peran kohati di dalam masyarakat khususnya kota Bandung, oleh karena itu-lah penulis mengangkat judul “Peran HMI-Wati Bandung dalam gerakan sosial”.

1.2. Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan penguatan yang dilakukan oleh Korps HMI-Wati (KOHATI) sehingga organisasi tersebut mampu memberikan dampak pada lingkungan sosial

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Peran Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI) dalam Penguatan Peran Mahasiswa di lingkungan Masyarakat?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta rujukan pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademisi baik ilmu komunikasi maupun komunikasi sosial pembangunan

1.4.2 Praktisi

Penelitian ini menjadi dasar praktisi bagi kajian ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi sosial Pembangunan

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	BULAN							
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGT
1.	Penelitian Pendahuluan								
2.	Seminar Judul								
3.	Penyusunan proposal Bab 1,2 dan 3								
4.	Seminar proposal								

5.	Pengumpulan data								
6.	Pengelolaan dan Analisis data								
7.	Penyusunan bab 4 dan 5								
8.	Pendaftaran Sidang Skripsi								
7.	Ujian Skripsi								

Tabel 1.1 Waktu Penelitian 1

Sumber: Olahan Penulis